BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sendiri dimana salah satunya adalah pada masa kolonial Belanda. Pada masa ini, banyak peraturan-peraturan yang dirancang dan diberlakukan oleh pihak Belanda dengan tujuan untuk diikuti oleh rakyat pribumi. Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif yang sangat terasa sekali bagi rakyat pribumi khususnya. Salah satu dari dampak positifnya ialah diberlakukannya Politik Etis sejak tahun 1901 dimana Belanda memperhatikan keinginan rakyat pribumi agar dapat setara dengan kaum penjajah. Lalu, dampak negatif yang dirasakan oleh rakyat pribumi adalah salah satunya masih saja terdapat strata sosial antara laki-laki dan perempuan yang mana pembagian tugasnya tidaklah sama atau sangat dibedakan. Jika dilihat dari segi politik, kaum laki-laki dan perempuan juga mendapat hak pilih yang jauh berbeda. Kaum perempuan dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan kaum laki-laki. hal tersebut juga dikemukakan oleh Cahyani dkk. (2015, hlm. 2) bahwa :

> Perempuan pada masa penjajahan Belanda tidak memiliki hak yang sama dalam politik dan hak memilih. Ketika kebijakan moral muncul, dengan salah satu kebijakannya yaitu perluasan sektor pendidikan, menyebabkan perubahan pada masyarakat Indonesia, khususnya perubahan pada perempuan. Melihat penderitaan perempuan, perempuan mulai memperjuangkan haknya dengan mendirikan organisasi perempuan Indonesia.

Jika dapat disimpulkan secara garis besarnya adalah para kaum perempuan mulai menunjukkan eksistensinya untuk membuktikan bahwa para kaum perempuan tidak dianggap lemah terus menerus dan akhirnya mulai membentuk beberapa organisasi-organisasi perempuan dengan tujuan membentuk perempuan menjadi cerdas, terampil, dan mandiri. Selain itu, ada pendapat lain dari Hestirani (2020, hlm. 125) mengemukakan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan perempuan Indonesia adalah karena ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seringkali tidak berpihak pada perempuan.

Retno Wulandari, 2022
MARIA ULFAH : KIPRAH PEREMPUAN DALAM KANCAH POLITIK INDONESIA (1935-1988)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pasca kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu momen yang sangat dinanti sekali oleh bangsa agar terlepas dari belenggu penjajah yang sudah ratusan tahun membuat bangsa Indonesia menderita. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi dalam kurun waktu tersebut, masih saja bangsa Indonesia dihadapkan oleh masalah-masalah yang timbul dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal tersebut sependapat yang dikemukakan oleh Reid (1996, hlm. 295) bahwa :

> Pada masa waktu tahun 1945-1949 dianggap sebagai masa yang penting bagi bangsa Indonesia, karena pada masa itu bangsa Indonesia sedang memperjuangkan pengakuan internasional atas proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik melalui perjuangan material maupun diplomasi.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa saluran perjuangan material atau yang bisa disebut dengan perang merupakan salah satu saluran yang dipilih untuk melawan penjajah. Dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi selama bertahun-tahun itu, seluruh rakyat Indonesia juga ikut serta dalam perang dan para perempuan juga ikut serta. Partisipasi perempuan dalam perang melawan Sekutu sangat unik dan menarik karena ketika perempuan didorong oleh hati nuraninya untuk melawan Sekutu, kekuatan mereka semakin kuat karena mereka bersatu untuk melawan Sekutu, melindungi latar belakang independen. Sesuai dengan periode ini, memang ada banyak perempuan yang berpartisipasi dalam perang. Namun tergantung pada suasana saat itu, peran dan partisipasi perempuan juga beragam. Dilihat dari masa pasca kemerdekaan atau sekitar tahun 1945-1949, kaum perempuan merasa harus ikut berjuang untuk melindungi Indonesia agar semua yang telah mereka perjuangkan dengan keras tidak diambil kembali oleh penjajah.

Perkembangan bangsa Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan dan kemajuan secara konstitusi maupun dalam sistem pemerintahan. Dalam hal perpolitikan di tahun 1950-an atau pada masa Demokrasi Liberal sudah dapat dinilai dengan respon positif karena aturan-aturan yang dulu sangat tersiksa bagi sebagian orang, di masa ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya yaitu dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pada periode tahun 1949 – 1959 merupakan tempat berkumpulnya partai-partai politik di

dalam pemerintahan Indonesia dan banyak terjadi pergantian kabinet. Pada masa ini, kaum laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan kesetaraan akan memilih haknya dikarenakan sudah diberikan pendidikan yang layak dan dapat berkontribusi dengan baik dan cerdas. Secara keseluruhan yang sudah penulis jelaskan di atas, lingkup periodesiasi yang diambil oleh penulis (dalam kurun waktu 1920 – 1988) melewati tiga zaman pemerintahan yaitu masa pemerintahan kolonial, masa pemerintahan revolusi, dan masa pemerintahan demokrasi liberal.

Semakin berkembangnya zaman dan waktu, peran perempuan sudah sangat diperhatikan dengan teliti dan detail. Dalam berbagai perspektif dalam pelaksanaan pembangunan perlu dikoreksi agar tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan diarahkan dengan baik dan masih mempertahankan nilai-nilai historis perjuangan perempuan. Dalam hal ini, pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kondisi yang sama sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak serta berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pendidikan dan budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Prantiasih (2014) mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana semestinya. Dia mengatakan bahwa:

> Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam perekonomian. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil bahwa perempuan memiliki sedikit kesempatan kerja dan bisnis, serta akses yang buruk terhadap hak-hak ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, modal kerja, dan lain sebagainya. Meskipun pendapatan wanita bekerja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan kebahagiaan keluarga, namun perempuan tetap dianggap sebagai pencari nafkah dan pekerja keluarga.

Dengan demikian yang telah dijelaskan di atas bahwasannya perempuan masih dianggap “lemah” oleh beberapa masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah anggapan perempuan mendapat kesempatan pendidikan hanya sampai sekolah menengah, dan perempuan juga tidak diberikan kesempatan untuk bekerja dan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga saja. Pandangan tersebut yang sudah tersebar luas di lingkungan sekitar menjadi perdebatan bahwa

mengapa perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya dan bekerja, padahal dengan bekerja juga perempuan dapat merangkap menjadi ibu rumah tangga untuk suami dan anaknya sehingga kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi tidak dilupakan begitu saja.

Dalam bidang ekonomi, perempuan juga tidak mau kalah dan diremehkan karena tidak bisa bekerja sama dengan laki-laki. Keinginan membantu suami meningkatkan ekonomi keluarga bukanlah hal yang sulit bagi istri yang sudah dewasa. Perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Dari berkebun, bertani, berdagang hingga menjadi buruh pabrik, perempuan bekerja untuk menafkahi keluarganya (Rizkia, 2017, hlm. 4). Faktanya, masih banyak perempuan di masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga, yang belum banyak mengakses peran di masyarakat. Di zaman modern sekarang ini, perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga masih merasa terbebani, misalnya ketika suami jauh dari rumah, istri juga seorang istri yang harus memenuhi tugas pekerjaan rumah seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak, dan lain sebagainya. Lain halnya jika perempuan juga ingin bekerja, yang banyak di antaranya masih bekerja di usaha kecil dengan upah yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena semacam ini perlu dikaji lebih lanjut agar aksesibilitas perempuan di masyarakat menjadi luas.

Begitupun juga dalam bidang politik, kaum perempuan juga dinilai tidak bisa bersanding dengan kaum laki-laki dalam bidang tersebut. Faktor utama dari pandangan tersebut adalah adanya stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang menuntut akal, dunia yang penuh argumentasi, dan dunia yang membutuhkan pemikiran cerdas, yang kesemuanya seharusnya milik dunia tentang laki-laki, bukan perempuan (Astuti, 2008, hlm. 1). Pandangan ini yang juga membuat kaum perempuan lebih baik tinggal dirumah saja atau lebih baik bekerja selain di bidang politik karena pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih terbilang minim dan akhirnya masyarakat juga tidak perlu memberikan pemahaman kepada kaum perempuan tentang pemahaman dunia politik. Kondisi ini yang membuat

banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang berjuang untuk meningkatkan kaum perempuan yang mana salah satunya adalah Maria Ulfah.

Maria Ulfah merupakan salah satu tokoh dari Indonesia yang belum banyak diketahui oleh sebagian masyarakat umum. Maria Ulfah merupakan anak pertama dari R.A.A. Mohammad Achmad dan R.A. Hadidjah Djajadiningrat yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1911 di Kota Serang, Banten (Rasid, 1982, hlm. 7). Keluarga Maria Ulfah merupakan keluarga dari golongan atas atau bisa disebut sebagai golongan priyayi, dimana ayahnya adalah seorang Pamong Praja yang kemudian menjabat sebagai Bupati Kuningan. Disini peran Ayah untuk Maria Ulfah juga sangatlah besar karena pemikiran-pemikiran dari sang Ayah yang sangat maju membuat Maria Ulfah semangat untuk membantu meningkatkan derajat wanita. Maria Ulfah memilih jalur pendidikannya untuk mengambil jurusan hukum dan masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Leiden. Setelah menyelesaikan masa studinya, Maria Ulfah berhasil menjadi perempuan Indonesia pertama yang lulus dengan gelar *meester in de rechten* (Mr) atau Sarjana Hukum. Selain itu, Maria Ulfah juga terjun ke bidang politik dimana Maria Ulfah menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan juga setahun kemudian dilantik menjadi Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I di tahun 1947 (Andanareswari, 2019).

Melihat keadaan para kaum perempuan semakin memprihatinkan, Maria Ulfah sendiri mulai merasa perasaan yang sangat iba sekaligus rasa khawatir akan nasib kaum perempuan dan akhirnya Maria Ulfah yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas mulai tergerak hatinya untuk maju ke kancah politik dengan mulai mengikuti Kongres Perempuan Indonesia Kedua yang dilaksanakan pada tahun 1935 yang dilaksanakan di Batavia (Triyana dkk, 2012, hlm. 24). Maria Ulfah ikut andil dalam kongres tersebut dengan membawa harapan yang besar bahwa melalui kongres ini ia dapat membantu dan melaksanakan cita-citanya untuk ikut memperbaiki kedudukan kaum perempuan dan rakyat Indonesia yang dipandang sebelah mata oleh para penjajah. Inilah titik awal Maria Ulfah mulai menyukai dan bertekad untuk

terus maju dalam kancah politik dan memberikan kontribusi yang diingat selalu oleh kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia.

Keadaan Indonesia yang semakin genting pasca kemerdekaan Indonesia masih jelas terasa. Indonesia masih harus menghadapi ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Faktor dari luar negeri permasalahannya adalah pihak Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia, sedangkan faktor dari dalam negeri permasalahannya adalah perebutan kursi pemimpin Indonesia yang mana hal ini membuat Soekarno-Hatta mengeluarkan beberapa perintah agar memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik. Tujuan dari dikeluarkannya partai-partai politik ini adalah dapat memperketat dan mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan masyarakat Indonesia agar aman dan tentram, yang mana nantinya disini setelah berdirinya partai-partai politik sistem pemerintahan akan berganti menjadi sistem parlementer.

Kabinet Sjahrir II ini terbentuk kembali setelah sebelumnya Kabinet Sjahrir I jatuh akibat pertentangan oleh pihak oposisi di dalam negeri. Sjahrir ditunjuk kembali untuk kabinet baru setelah pihak oposisi dan akhirnya Kabinet Sjahrir II dilantik pada tanggal 12 Maret 1946 (Departemen Penerangan, 1970, hlm. 5). Dalam kabinet keduanya, Sjahrir terus berunding dengan tujuan menjaga kemerdekaan Indonesia. Sjahrir mengajukan usul yang berlawanan dengan van Mook yang menuntut agar Belanda mengakui kedaularan penuh Republik Indonesia atas bekas Hindia Belanda dan tidak mendirikan persemakmuran seperti yang diusulkan sebelumnya. Setelah Belanda menolak tawaran tersebut, van Mook mengusulkan pembentukan negara Indonesia dalam bentuk federasi yang beraliansi dengan Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 1946 Sjahrir menjawab dengan isi pokok bahwa Pemerintah Belanda akan mengakui kedaulatan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera (Prihartanti, 2010, hlm. 7).

Sjahrir selaku Perdana Menteri yang menjabat kembali dalam Kabinet Sjahrir II, mulai merombak kembali untuk memilih jajaran para menteri yang siap untuk kembali bertugas dalam kabinet tersebut. Meskipun ada beberapa yang diajukan kembali oleh Sjahrir, tetap saja banyak yang memilih untuk

mengundurkan diri atau bahkan tidak bersedia untuk menjadi menteri kembali. Pada akhirnya Sjahrir merombak kembali jajaran para menteri, salah satunya memutuskan untuk memasukkan satu nama perempuan di dalam kabinetnya yaitu Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial (Simanjuntak, 2003, hlm. 30). Hal ini mendapatkan sambutan baik dari beberapa organisasi perempuan Indonesia yang memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Maria Ulfah sebagai menteri. Dipilihnya sosok Maria Ulfah bagi Sjahrir juga bukan tanpa alasan, meskipun Sjahrir telah lama mengenal Maria Ulfah karena dahulu mereka kuliah di tempat yang sama dan memiliki satu pikiran yang sama, tetapi Sjahrir sudah memahami karakter dan pemikiran di dalam diri Maria Ulfah. Pada awalnya Maria Ulfah dipilih sebagai menteri sempat merasa heran dan ragu mengapa ia yang dipilih oleh Sjahrir dikarenakan ia sendiri tidak memiliki pengetahuan akan dunia politik di Indonesia dan merasa masih banyak tokoh perempuan yang lebih berkompeten di bidangnya, tetapi dengan tegas dan lugas Sjahrir meyakinkan bahwa Maria Ulfah juga dapat mengemban amanat yang telah diberikan oleh Sjahrir. Akhirnya dengan pertimbangan yang cukup panjang, Maria Ulfah menerima tawaran tersebut untuk menjabat Menteri Sosial.

Alasan penulis ingin mengkaji mengenai Maria Ulfah : Kiprah Perempuan dalam Kancah Politik Indonesia. *Pertama*, nama Maria Ulfah, perempuan yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan dan politik, belum banyak diketahui orang. Maria Ulfah juga menjadi perempuan pertama yang berhasil menduduki posisi menteri di dalam Kabinet Sjahrir dan diangkat menjadi Menteri Sosial. Fokus penelitian ini adalah pada peran dan kontribusi Maria Ulfah sebagai salah satu tokoh perempuan yang aktif di kancah politik Indonesia.

Kedua, ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan rentang waktu tahun 1935 hingga 1988 sebagai batasan kajian penelitian. Dimulai pada tahun 1935 dikarenakan pada tahun itu Maria Ulfah turut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia Kedua dan pada tahun 1988 karena di tahun tersebut Maria Ulfah mengundurkan diri dari perjuangannya untuk perempuan dan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian masalah dan alasan yang diberikan di atas, menarik bagi peneliti untuk memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang peran Maria Ulfah sebagai salah satu perempuan yang aktif terlibat dalam politik di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mencoba merumuskannya ke dalam sebuah judul penelitian, yaitu **Maria Ulfah : Kiprah Perempuan dalam Kancah Politik Indonesia (1935 – 1988).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu "*Bagaimana kiprah Maria Ulfah dalam kancah perpolitikan Indonesia?*", adapun pertanyaan dan rumusan masalah penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi Maria Ulfah untuk menjadi tokoh pergerakan perempuan di Indonesia dan tertarik terjun ke dalam dunia politik?
2. Bagaimana kondisi perempuan serta kebijakan Maria Ulfah saat menjabat menjadi Menteri Sosial pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir di tahun 1946 – 1947?
3. Apa kiprah Maria Ulfah bagi pergerakan perempuan di tahun 1948 – 1988?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Mendeskripsikan alasan Maria Ulfah untuk menjadi tokoh pergerakan perempuan di Indonesia dan tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik.
2. Mendeskripsikan kondisi perempuan serta kebijakan Maria Ulfah saat menjabat menjadi Menteri Sosial pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir di tahun 1946 – 1947.
3. Mendeskripsikan kiprah Maria Ulfah bagi pergerakan perempuan di tahun 1948 – 1988.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini secara umum, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang "Maria Ulfah

(Kiprah Perempuan dalam Kancah Politik Indonesia) (1935-1988)". Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini antara lain :

1. Manfaat secara Teoritis

a) Untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang kehidupan tokoh perempuan di Indonesia yaitu Maria Ulfah serta menambah informasi tentang peranan Maria Ulfah bagi dunia politik di Indonesia.

b) Berkontribusi bagi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) khususnya bagi Program Studi Pendidikan Sejarah dengan memperkaya karya ilmiah sejarah bagi perempuan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara Praktis

a) Bagi dunia pendidikan dapat dijadikan sebagai referensi sumber informasi Sejarah Indonesia kelas XI Wajib untuk Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia.

b) Untuk masyarakat umum yang peduli akan sejarah, penulis berharap dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan yang bermanfaat terlebih mengenai Maria Ulfah dalam Kiprah Perempuan dalam kancah Politik di Indonesia di tahun 1935 – 1988.

c) Untuk penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai tokoh Maria Ulfah bagi pergerakan perempuan di Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan Karya Ilmiah berupa skripsi, struktur organisasi harus lebih sistematis, untuk membuat struktur organisasi penyusunan skripsi ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Tujuan dari struktur organisasi skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang isi dari setiap bab, dari urutan penulisan dan hubungan antar bab dalam bentuk kerangka skripsi yang utuh. Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bab, isinya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa peneliti meneliti dan menulis skripsi, cara membangun masalah disajikan secara rinci pada beberapa poin

seperti rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti menjelaskan konsep atau teori yang mendukung dalam proses mempertimbangkan masalah yang dilakukan. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan juga akan dijelaskan dan daftar sumber yang digunakan sebagai referensi pada saat penulisan skripsi disajikan. Konsep dan teori relevan dan konsisten dengan pembahasan karya ilmiah untuk memudahkan pemahaman pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan metode yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah, meliputi metode penulisan dan metode penelitian yang peneliti gunakan. Cara penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan resmi peneliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melengkapi karya ilmiah juga dijelaskan dalam bab ini, metode penelitian dijelaskan termasuk tahapan penelitian dari persiapan hingga penyelesaian penelitian dan dievaluasi oleh peneliti. Bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih terstruktur dan sistematis.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan membahas permasalahan yang diangkat. Selain itu juga akan dijelaskan data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang sebelumnya telah melalui tahap *review* dan verifikasi. Data yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan dalam teks yang tepat dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini merupakan bab terakhir dari karangan, sifat karya ilmiah yang berupa gambaran umum menjelaskan hasil peelitian dari awal sampai akhir sebagai jawaban atas rumusan masalah. Rekomendasi dimaskudkan untuk menjelaskan manfaat skripsi ini dalam dunia pendidikan.